



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2021.**
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang proyeknya belum tercantum dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dicantumkan pada perubahan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 atau tahun berikutnya.
- KETIGA** : Perubahan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 30 JUNI 2021

DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2021

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP DITAWARKAN

1. Jalan Tol Semanan-Balaraja;
2. Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg;
3. Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung);
4. Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikunir-Karawaci;
5. Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat;
6. Proyek KPBU *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi;
7. Proyek Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES PENYIAPAN

1. Jalan Tol Semarang Harbour;
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sarbagikung (Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung), Bali;
3. Pembangunan Bendungan Merangin, Jambi;
4. Perumahan Cisaranten Bina Harapan, Bandung;
5. Proyek Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara;
6. Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat;
7. Jalan Tol Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);
8. Jembatan Batam-Bintan;
9. Proyek KPBU Kawasan Industri Teluk Bintuni;
10. Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional (PPAKRN);
11. Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Modern;
12. Pembangunan Lembaga Pemasarakatan dan Pengembangan Kawasan Agro Industri;

13. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu di Regional Sumatera;
14. Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangerang Selatan;
15. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Ngawi Planetarium Agro Park;
17. Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun;
18. Proyek PSEL Jatibarang Kota Semarang;
19. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede (Cirebon Raya);
20. Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro;
21. Proyek Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan;
22. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Dadimuria;
23. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas Tahap 2;
24. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pantura, Jawa Timur;
25. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung;
26. Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kuta, Badung;
27. Pembangunan Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara;
28. Jalan Tol Malang-Kepanjen;
29. SPAM Ir. H. Djuanda (Jatiluhur II);
30. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong (Sistem Kaliboyo);
31. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Medan;
32. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Batam;
33. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Lampung;
34. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Palembang;
35. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Depok;
36. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Pasuruan;
37. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto;

38. Proyek ...

38. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Cirebon;
39. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Jombang;
40. *Operation and Maintenance* (OM) Jembatan Suramadu;
41. Rumah Susun KPBU Karawang Spuur;
42. Jalan Tol Cilacap-Yogya;
43. Jalan Tol Demak-Tuban;
44. Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat;
45. Jalan Tol Kediri-Tulungagung;
46. Proyek Pelabuhan *New Ambon*, Maluku;
47. Proyek Pelabuhan Tanjung Carat, Sumatera Selatan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

